

AKUNTABILITAS KINERJA PENGELOLAAN PROGRAM WAJIB MADRASAH DINIYAH DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

Istighfarin
inifarin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh kondisi kinerja instansi pemerintah yang didalamnya terdapat hak dan juga kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kinerjanya yang sudah dilakukan dari berbagai upaya yang berguna untuk memaksimalkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satuan kerja instansi pemerintah di bidang pendidikan dan juga sebagai pengelola program bupati wajib diniyah yang tercantum dalam Perbup No 15 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 246-253). Fokus penelitian ini yaitu efektif, efisien, responsif, dan transparansi instansi pemerintah yang dikaji berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1990 terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam (Moeheriono, 2012:101). Hasil penelitian menunjukkan bahwapada konteks efektif: pencapaian tujuan rencana kerja satu tahun 90% telah terlaksana, akan tetapi jika dilihat pada konteks efisien penyerapan anggaran 10% belum menghasilkan manfaat, pada konteks responsif masih belum ada tindak lanjut dari kendala penyelenggara, dan transparansi masih belum maksimal dalam memanfaatkan media informasi baik cetak ataupun noncetak. Sehingga saran peneliti adalah evaluasi pada kendala intensif ustad/ustadzah, mengikut sertakan masyarakat dalam menentukan belanja anggaran, melakukan pertemuan rutin dengan penyelenggara wajib diniyah, menerbitkan laporan kinerja baik cetak ataupun elektronik.

Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sehingga memudahkan pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan pembangunan dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi diberbagai daerah di Indonesia. Seperti yang tertuang dalam konsep Peraturan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan perundang-undang yang berlaku.

Adanya sistem otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia pasca era reformasi bertujuan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Adapun hak dasar rakyat yang berhak dipenuhi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara ber-kesejahteraan dan berkeadilan salah satunya adalah hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang terjangkau (Adisasmita 2011:18). Otonomi daerah di bidang pendidikan tingkat lokal diserahkan kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan yang harus mampu mengelola pendidikan dengan lebih ber-tanggung jawab (Indiahono, 2006 : 156-158).

Pemerintah daerah ber-tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Pendidikan berkualitas merupakan salah satu harapan yang diinginkan diberbagai daerah di Indonesia. Harapan tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan negara, dengan kualitas pendidikan yang bermutu akan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa.

Dikutip dari situs <https://www.kemendiknas.go.id> laporan UNESCO dalam *Education For All Global Monitoring Report* (EFA-GMR), Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua atau *The Education for All Development Index* (EDI) Indonesia tahun 2014 berada pada peringkat 57 dari 115. Hal itu menjadi landasan pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia.

Kualitas pendidikan di Indonesia harus diimbangi dengan kualitas kinerja pemerintah untuk benar-benar mewujudkan cita-cita bangsa. Perlu adanya kesiapan dari seluruh aparatur negara untuk memberikan kinerja yang maksimal untuk menciptakan ke-pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan peraturan UU Nomor 28 / 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik buruknya pemerintahan bisa dapat dilihat dari sejauhmana *performance* birokrasi (Said 2012 : 89).

Baik dan buruk kinerja aparatur akan memberikan citra terhadap instansi tersebut

di mata masyarakat. Seperti kebanyakan instansi pemerintah yang pada saat ini banyak dijumpai kasus-kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga masyarakat juga menjadi alat kontrol untuk meminimalisir tindakan-tindakan tersebut. Sebagai organisasi publik yang lebih berorientasi pada kepentingan publik seharusnya aparatur negara lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya yang dibebankan kepada masing-masing pegawai sesuai dengan tang-gungjawabnya.

Organisasi publik merupakan tempat yang didalamnya terdapat hak dan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kinerjanya yang sudah dilakukan dari berbagai upaya yang berguna untuk memaksimalkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu instansi publik yang menjadi topik perbincangan dikalangan masyarakat adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagai pelaksana dibidang pendidikan.

Sesuai dengan visi misi Bupati Kabupaten Sumenep yaitu meningkatkan nilai-nilai keagamaan, dengan kondisi masyarakat yang saat ini mulai mengesampingkan keagamaan disebabkan oleh dua faktor keadaan yaitu semakin modern dan semakin canggihnya teknologi, sehingga memberikan dampak yang buruk pada situasi dan kondisi generasi muda yang ada di Kabupaten Sumenep

khususnya pada anak-anak usia SD,SMP, dan SMA. Dampak buruk yang ditimbulkan dari kedua faktor tersebut yaitu minimnya pengetahuan keagamaan di-kalangan siswa-siswi dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Hal itu melatar belakangi Peraturan Bupati No 15 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah.

Penyelenggaraan program yang berbasis pesantren ini bekerjasama dengan Kementrian Agama Kabupaten Sumenep, karena Kementrian Agama memiliki kewenangan untuk mengelola mandrasah disemua tingkat yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep, akan tetapi dinas pendidikan berperan langsung dalam sistem pe-ngawasan rencana kurikulum dan juga pelaksana dari peraturan bupati tersebut.

Menurut informasi yang peneliti dapatkan pada saat pra-penelitian kepada salah satu pegawai di sub bagian Program Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa pendidikan berbasis pesantren yang saat ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang sudah berjalan satu tahun ini pada tahun 2016 diterapkan pada kelas 1 SD, kelas 1 SMP, dan kelas 1 SMA, kemudian untuk 2017 diterapkan pada kelas 1 dan 2 SD, kelas 1 dan 2 SMP, dan kelas 1 dan 2 SMA. Program tersebut hanya diimplementasikan di wilayah Kecamatan Kota Sumenep dengan pembelajaran sejarah islam, aqidah akhlak, dan alqur'an hadist.

Program Wajib Diniyah menjadi sorotan publik dikarenakan pelaksanaan program tersebut tidak maksimal. Dikutip dari situs pemberitaan [http://jatim.tribunnews.com\(08/052017\)](http://jatim.tribunnews.com(08/052017)) ketua komisi IV, DPRD Sumenep mempertanyakan pelaksanaan wajib madrasah diniyah di tahun 2016 yang gagal dilaksanakan sehingga me-ngakibatkan hangusnya anggaran yang telah disediakan.

Menurut pegawai sub bagian perencanaan program pelaksanaan wajib madrasah diniyah yang sudah berjalan satu tahun telah mencapai hasil 90%. Akan tetapi dilihat pada realitas dilapangan dijumpai hal yang berbeda dengan hasil tersebut seperti kesiapan tenaga pengajar hingga kurikulum pembelajaran, dan sarana dan prasarana yang harusnya disediakan untuk sekolah belum mencapai hasil yang maksimal.

Kinerja aparatur Dinas Pendidikan yang tidak maksimal tentulah memiliki beberapa faktor sehingga dari uraian diatas maka penulis tertarik merumuskan judul Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Moehariono (2012:99) akuntabilitas sangat berhubungan dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggung jawaban kepada otoritas yang

lebih tinggi dalam sebuah rantai komando organisasi, akan makna akuntabilitas lebih luas jika merujuk kepada sebuah keadaan yang lebih luas dengan standart kinerja yang bertumpu pada harapan organisasi, sehingga nantinya dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban tugas dan tanggung jawab.

Penilaian terkait dengan akuntabilitas birokrasi dapat dilihat dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Karena Dinas Pendidikan juga termasuk dalam suatu instansi pemerintah maka akuntabilitas

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah, dan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- 3) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas tanggung jawabannya. (Moehariono, 2012:101).

Menurut Moehariono (2014:34) efektif merupakan indikator mengukur tingkat kesesuaian output (keluaran) yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator mengenai efektivitas

ini menjawab pertanyaan mengenai kegiatan yang telah dilakukan sudah benar dilakukan atau tidak.

Menurut Sutrisno (2007 : 125-126) efektivitas suatu kegiatan dapat diperhatikan dari beberapa indikator yaitu: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapainya tujuan.

Safroni (2012:27) efisien diartikan bahwa tujuan atau motif administrasi adalah mencapai hasil yang efektif dan efisien, selain itu juga efisien disebut juga berdaya guna.

Bridgman dan Davis (2000) dalam Setiyono (2014:148) juga mengatakan efisien merupakan kegiatan dan program institusi, harus dilaksanakan dengan biaya semurah mungkin atau menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin.

Menurut UNDP (*United Natio Development Program*) dalam Lembaga Administras Negara (2004:22-23) dalam Safroni (2012:132-133) responsif dalam pengertian daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan masyarakat.

Menurut Djiptono (1007:14) dalam Hardiyansyah (2011:53) daya tanggap merupakan kegiatan para staf dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

Bridgman dan Davis (2000) dalam Setiyono (2014:148) transparansi dalam instansi publik harus bekerja dalam suasana

terbuka, *acesible* (dapat dilihat, diperiksa, dipantau), dan *controlable* (dapat dikontrol) oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumenep. Dikaji berdasarkan atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diinstruksi Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan responsif, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah, dan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- 3) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas tanggung jawabannya. (Moehariono, 2012:101)

Berdasarkan AKIP tersebut yang dijadikan sebagai acuan maka penelitian ini memfokuskan pada empat poin, diantaranya:

1. Efektif, pada konteks akan dilihat dari petunjuk pengelolaan program yang ada

- dalam pencapaian sasaran ataupun tujuan program wajib diniyah.
2. Efisien, pada konteks ini efisien akan dilihat dari kesesuaian proses pelaksanaan program wajib diniyah dalam memanfaatkan sumber daya.
 3. Responsif, sedangkan pada konteks ini responsif akan dilihat dari kecepatan dan ketepatan aparatur dalam merespon permasalahan yang dihadapi pelaksanaan wajib diniyah.
 4. Transparansi instansi pemerintah, konteks ini dinilai dari penyediaan media informasi yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep serta pelaporan kinerja.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terkait fokus kajian Akuntabilitas Kinerja terkait fokus pertama yaitu efektif, Pelaksanaan wajib diniyah yang diterapkan di daerah Kecamatan Kota Sumenep berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa pelaksanaan Wajib Diniyah yang ditetapkan pada Juli 2016 ini benar-benar dilaksanakan pada tahun 2016 dengan cukup efektif. Karena program ini merupakan kebijakan baru sehingga pelaksanaanya belum sempurna. Dimana menurut Moehariono (2014:34) efektif merupakan indikator mengukur tingkat kesesuaian *output* (keluaran) yang

dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator mengenai efektivitas ini menjawab pertanyaan mengenai kegiatan yang telah dilakukan sudah benar dilakukan atau tidak.

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah dengan maksud seluruh lembaga pendidikan yang berada di Kecamatan Kota Sumenep untuk melaksanakan program ini. Oleh karena itu kesesuaian antara perencanaan dengan *output* (keluaran) dilakukan secara baik dan benar oleh Dinas Pendidikan dengan menyesuaikan peraturan dan petunjuk yang telah ditetapkan yang telah tercantum dalam Perbup dan Petunjuk teknisnya. Dimana pada peraturan dan juknis Wajib Diniyah dilaksanakan pada siswa sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA dengan berhatap mulai dari pelaksanaan satu kelas hingga terlaksana dua kelas masing-masing tingkatannya. Dengan klasifikasi kelas diniyah Ula (SD), Ustho (SMP), dan Ulya (SMA).

Selain itu juga pembagian ruang dan waktu pembelajaran memang terealisasi sesuai dengan aturan yang ada. jumlah guru serta kerjasama dengan lembaga lain juga terjalin. Dengan itu bisa dikatakan bahwa upaya kinerja Dinas Pendidikan untuk memenuhi ketercapaian tujuan dilakukan secara profesional.

Hal yang sama juga disampaikannya menurut Menurut Sutrisno (2007 : 125-126) efektivitas suatu kegiatan dapat diperhatikan dari beberapa indikator yaitu: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapainya tujuan. Jika dipadukan dengan teori tersebut dengan hasil peneliti di lapangan program ini memiliki tujuan yang positif sehingga membawa hasil yang baik, artinya semua lembaga pendidikan di daerah Kecamatan Kota Sumenep. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahan terhadap program wajib diniyah ini sangat baik hal tersebut bisa dilihat dari penyelenggara program wajib diniyah sangat memahami alur maksud dan tujuan dari program tersebut.

Selain itu juga target pelaksanaan yang tertuang dalam rencana kerja satu tahun dari program yang berjala satu tahun ini pada target periode satu tahu yaitu terselenggaranya wajib diniyah di seluruh lembaga pendidikan di Kecamatan Kota Sumenep dan hal itu tercapai sesuai dengan target sasaran.

Fokus kedua yaitu efisien, Berdasarkan hasil penelitian bahwa anggaran yang besar dan pemanfaatan sumberdayan di-lakukan dengan biaya yang minim ini tidak bisa dikatakan berdaya guna. Dimana menurut Menurut Safroni (2012:27) efisien diartikan disebut juga berdaya guna. Artinya berdaya guna dalam menghasilkan

hasil dan manfaat. Sedangkan pada pelaksanaannya hal itu tidak sesuai membawa hasil dan manfaat.

Klasifikasi belanja anggaran untuk membiayai program ini salah satunya yang telah penyelenggara wajib diniyah dapatkan adalah berupa papan tulis, raport, dan silabus. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengamatan langsung dilapangan bahwa raport yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang mengikuti Wajib Diniyah sehingga raport tidak digunakan.

Bridgman dan Davis (2000) dalam Setiyono (2014:148) mengatakan efisien merupakan kegiatan dan program institusi, harus dilaksanakan dengan biaya semurah mungkin atau meng-gunakan sumberdaya yang seminimal mungkin. Walaupun kegiatan program ini dilakukan menggunakan biaya semurah mungkin, akan tetapi berdasarkan hasil yang ditemui dilapangan bahwa beberapa sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Pendidikan memang benar teralisasi dilapangan, akan tetapi untuk insentif gaji, buku pegangan guru dan siswa belum terlaksana dengan baik. Disisi lain jika dilihat dari segi fungsi dan manfaat sarana dan prasarana di lapangan belum efisien. Artinya dalam klasifikasi anggaran 2016 telah mencantumkan buku pegangan akan tetapi baik lembaga penyelenggara dan siswa tidak mendapatkan buku pegangan.

Fokus ketiga yaitu responsif, Pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah pada prakteknya memiliki beberapa tanggapan, kebutuhan, dan juga tindak lanjut dari dari kebutuhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Pendidikan terlihat lambat dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, artinya tidak ada tindak lanjut dari apa yang sudah masyarakat keluhkan. Selain itu juga kurang intensifnya Dinas Pendidikan dalam menajalin komunikasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan Wajib Diniyah sehingga terjadi miskomunikasi dengan lembaga-lembaga yang lain.

Menurut UNDP (*United Natio Development Program*) dalam Lembaga Administras Negara (2004:22-23) dalam Safroni (2012:132-133) responsif dalam pengertian daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan masyarakat. sebagai penyelenggara yang juga berperan sebagai masyarakat yang terkena dampak kebijakan telah menyuarakan aspirasi langsung kepada Dinas Pendidikan, seperti hasil penelitian bahwa masyarakat butuh kejelasan pemberian insentif kepada guru pengajar yang sebelumnya dijanjikan, dimana apabila hal itu dibiarkan akan menimbulkan persepsi yang beraneka ragam oleh masyarakat.

Selain itu juga apabila kebutuhan mereka tidak terpenuhi maka lambat laun

tidak hanya satu penyelenggara yang membekukan pelaksanaan wajib diniyah, akan tetapi akan berdampak besar bagi keseluruhan penyelenggara. Sedangkan menurut Djiptono (2007:14) dalam Hardiyansyah (2011:53) daya tanggap merupakan kegiatan para staf dalam membantu pelanggan sedangkan hasil penelitian kurangnya Dinas Pendidikan dalam menyurvei langsung ke lapangan sehingga kurang mengetahui apa kebutuhan dari masyarakat atau penyelenggara madrasah diniyah. Seperti pada hasil penelitian di lapangan bahwa ada beberapa sekolah yang membiarkan anak-anaknya ke madrasah padahal seharusnya urusan anak-anak didiknya harus di pastikan benar-benar masuk madrasah atau tidak. dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

Fokus keempat yaitu transparansi instansi pemerintah, Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak terlepas dari kegiatan pelaporan kinerja seperti menurut Sedarmayanti (2013:109-112) bahwa salah satu yang harus diperhatikan dari akuntabilitas adalah Penyusunan laporan harus mengikuti prinsip yang lazim, disusun secara jujur, objektif, dan transparansi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan pembuatan pelaporan memang dilakukan. Untuk program wajib diniyah pelaporan yang sementara berbentuk Dokumntai Kegiatan Wajib Diniyah Piloting Kabupaten Sumenep.

laporan tersebut yang nantinya akan diserahkan kepada DPR selaku otoritas yang lebih tinggi.

Sedangkan Menurut Bridgman dan Davis (2000) dalam Setiyono (2014:148) transparansi dalam instansi publik harus bekerja dalam suasana terbuka, *accessible* (dapat dilihat, diperiksa, dipantau), dan *controlable* (dapat dikontrol) oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap kinerja Dinas Pendidikan, hal ini dibuktikan dari ketersediaan media untuk menyediakan informasi.

Seperti pada [www.-
disdik.sumenepkab.go.id/pages/saran](http://www.disdik.sumenepkab.go.id/pages/saran), [http://
kepegawaiandiknassumenep.blogspot.co.id](http://kepegawaiandiknassumenep.blogspot.co.id). melalui situs tersebut kegiatan baik sosialisasi program, pengumuman, laporan, dan juga kritik dan saran dapat diakses untuk masyarakat luas. Akan tetapi penggunaan dari media sosial tidak dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat. UNDP (*United Natio Development Program*) dalam Lembaga Administrasi Negara (2004:22-23) dalam Safroni (2012:132-133) transparansi dalam arti keterbukaan dan kebebasan dalam arus informasi sehingga mudah diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Arus informasi dua arah yaitu pemerintah dan masyarakat yang mudah diakses sangat dibutuhkan dalam suatu

instansi pemerintah selain dijadikan sebagai bahan evaluasi juga menentukan dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan selanjutnya. Selain itu juga informasi yang jelas dan terperinci akan memberikan dampak yang baik terhadap citra instansi.

Jika dilihat dari media baik elektronik maupun cetak yang disediakan oleh Dinas pendidikan belum baik. karena berdasarkan pengamatan peneliti terhadap *website* Dinas Pendidikan walaupun mudah diakses akan tetapi isi dari situs tersebut kurang rinci dan tidak jelas. Selain itu kondisi informasi langsung berupa papan tidak berfungsi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa hasil penelitian beserta pembahasannya yang mengacu pada tinjauan puatka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 (Moehariono, 2012:101)

Hasil penelitian terhadap empat fokus yang menjadi acuan peneliti yaitu efektif, efisien, responsif, dan transparansi instansi pemerintah dapat disimpulkan pelaksanaan program wajib diniyah di Kecamatan Kota Sumenep belum maksimal. Jika dilihat dari konteks efektif pencapaian tujuan rencana kerja satu tahun 90% telah terlaksana, akan tetapi jika dilihat pada konteks efisien penyerapan anggaran 10% belum menghasilkan manfaat, pada konteks

responsif masih belum ada tindak lanjut dari kendala penyelenggara, dan transparansi masih belum maksimal dalam memanfaatkan media informasi baik cetak ataupun noncetak. Sehingga perlu adanya evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi, mengikut sertakan masyarakat dalam menentukan belanja anggaran, melakukan per-temuan rutin dengan penyelenggara wajib diniyah. Selain itu juga perlu adanya penerbitan laporan kinerja baik baik cetak ataupun elektronik sehingga tujuan dari program wajib diniyah dapat terealisasi dengan baik dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahadjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Aprizal., dan Purba, Jon Roi Tua. 2013. "Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Kota Pangkalpinang." *Jurnal kebijakan & administrasi publik*. Vol. 17 no.1. Hl 15-28
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Farhan, Djuni. 2009. *Etika Dan Akuntabilitas Profesi Akuntan Publik*. Intimedia, Malang.
- Hardiyansyah. 2011. *KUALITAS PELANAN PUBLIK Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*. Gaya Media. Yogyakarta.
- Humas. 2015. "Indonesia Peringkat ke- 57 EDI dari 115 Negara Tahun 2014". (<https://www.kemenkopmk.go.id/artike/indonesia-peringkat-ke-57-edi-dari-115-negara-tahun-2014> diakses tanggal 31/05/2017)
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Moeheriono. 2014. *Indikator Kinerja Utama (IKU) Perencanaan, Aplikasi, Dan Pengembangan*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung
- Mutiarin, Dyah., dan Zaenudin, Arif. 2014. *Manajemen birokrasi dan kebijakan penelusuran konsep dan teori*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. CV Alvabeta, Bandung.
- Peraturan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Pratiwi, Qori Lusi. 2014. "akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *e-procurement* (studi pada layanan pengadaan secara elektronik pemerintah kabupaten kediri)" *jurnal administrasi publik vol.2 no.2*. [Http://administrasipublik.studentjournal.uib.ac.id/index.php/jap/article/view/382](http://administrasipublik.studentjournal.uib.ac.id/index.php/jap/article/view/382) diakses pada tanggal 23/11/2016
- Robbins, Stephen P., dan Coulter, Mary. 2009. *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*. Erlangga, Jakarta.
- Rofiaty. 2012. *Inovasi dan kinerja: Knowledge Sharing Behavior Pada Ukm*. Malang: UB Press
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen Dan Reformasi Pelayanan Publik. Dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Aditya Media Publishing. Malang

- Said, M.Ms'ud. 2012. *Birokrasi di Negara Birokrastis*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Sangadji, Etta Mamang., dan Sopiah. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Caps, Yogyakarta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama, Bandung
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Studi Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung.
- Siswanto. 2008. *Pengantar Manajemen*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudarmanto. 2014. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sdm Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Alfabeta, Bandung.
- Surya/Mohammad Rifai. 2016. "Aneh, Dana Diniyah Rp 1 M Diknas Sumenep Mandeg". *Tribunjatim* (<http://jatim.tribunnews.com/2017/05/08/aneh-dana-diniyah-rp-1-m-diknas-sumenep-mandeg> diakses tanggal 31/05/2017)
- Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana, Jakarta.
- Umam, Khaerul. 2012. *Perilaku Organisasi*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Pelayanan Publik (Konsep, Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Wardhana, Gede Ary Surya. 2015. "pengaruh kompetensi pada akuntabilitas instansi pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi." *E-jurnal ekonomi dan bisnis Universitas Udayana* 4.09 <http://ojs.unud.ac.id/index.php/eeb/article/view/14050> diakses pada tanggal 23/11/2016
- Wicaksono, Kristian Widya. 2015. "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*. Vol. 19 no.1. Hl 17-26
- Widodo, Suparno Eko. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yusrianti, Hasni., Dan Safitri, Rika Henda. 2015." Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang." *Jurnal manajemen dan bisnis sriwijaya* vol. 13 no. 4. <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/article/view/3153> diakses pada tanggal 23/11/2016